

Berita Lingkungan Hidup

DPR Diharapkan Tanggap Krisis SDA

Jakarta, Kompas - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat bidang lingkungan meminta DPR periode 2009-2014 merespons krisis sumber daya alam Indonesia. Sebanyak 10 agenda mendesak sudah disampaikan.

"Intinya, kami mendorong ke arah baru pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA)," kata Koordinator Institut Hijau Indonesia (IHI) Chalid Muhammad di Jakarta, Minggu (11/10). Selain IHI, ada Walhi, Jatam, Greenpeace Indonesia, Sawit Watch, Kiara, dan Lima.

Salah satu langkah yang diharapkan adalah ada tim DPR yang mengkaji sejumlah undang-undang pemicu kehancuran ekologi, seperti UU Mineral dan Batu Bara, UU tentang perikanan, UU mengenai kehutanan, dan UU penanaman modal. "Kami minta juga adanya kaukus lintas komisi yang cepat merespons persoalan bangsa," ujarnya.

Tambang dan energi

Secara terpisah, Koordinator Jatam Siti Maemunah menekankan perlunya mengkaji praktik pengelolaan tambang dan energi. Saat ini sisi pantai utara Jawa dipenuhi eksploitasi minyak dan gas, sedangkan di sisi pantai selatan Jawa emas, pasir besi, dan mangan dieksploitasi.

Pulau Kalimantan terus dikeruk batu baranya. "Beberapa kabupaten penghasil justru tak mendapat manfaat, tetapi diekspor," katanya. Selain berharap ada perubahan mendasar pada teks sejumlah UU, perubahan diminta untuk sistem pengelolaan SDA ramah lingkungan dan berkelanjutan. "Jangan lagi membodohi diri sendiri dengan mengeruk SDA untuk negara lain, sementara penduduk lokal sengsara turun-temurun," ujarnya. Akhir pekan lalu desakan itu disampaikan kepada sejumlah anggota DPR yang baru. (GSA)